

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih melaksanakan upaya pembangunan nasional di berbagai bidang. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita, 1996). Dalam melaksanakan upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, tentunya Pemerintah membutuhkan modal yang cukup besar. Namun kemampuan Pemerintah dalam menyediakan modal tersebut sangatlah terbatas. Maka dari itu, Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dan usaha agar mendapatkan modal untuk mempercepat upaya pembangunan nasional.

Pembangunan nasional menitikberatkan dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan para investor atau penanam modal baik dalam negeri maupun asing secara maksimal. Upaya ini tentunya berkaitan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1989 Tentang REPELITA V, Bab 7 tentang Pengembangan Dunia Usaha dijelaskan, bahwa “penanaman modal khususnya modal asing masih diperlukan dalam pembangunan di berbagai bidang terutama yang dapat menghasilkan ekspor, mendorong perkembangan dan alih teknologi, serta menciptakan lapangan kerja dan diarahkan untuk mendorong kemampuan dan pertumbuhan dunia usaha nasional”.

Program pembangunan nasional secara tegas disebutkan bahwa kebijaksanaan dan penyelenggaraan penanaman modal ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam suatu instrumen kebijakan berupa peraturan perundang-undangan seperti melalui peraturan pemerintah, keputusan presiden, menteri, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam menetapkan tujuan tersebut pemerintah menginginkan tercapainya suatu tujuan tertentu.

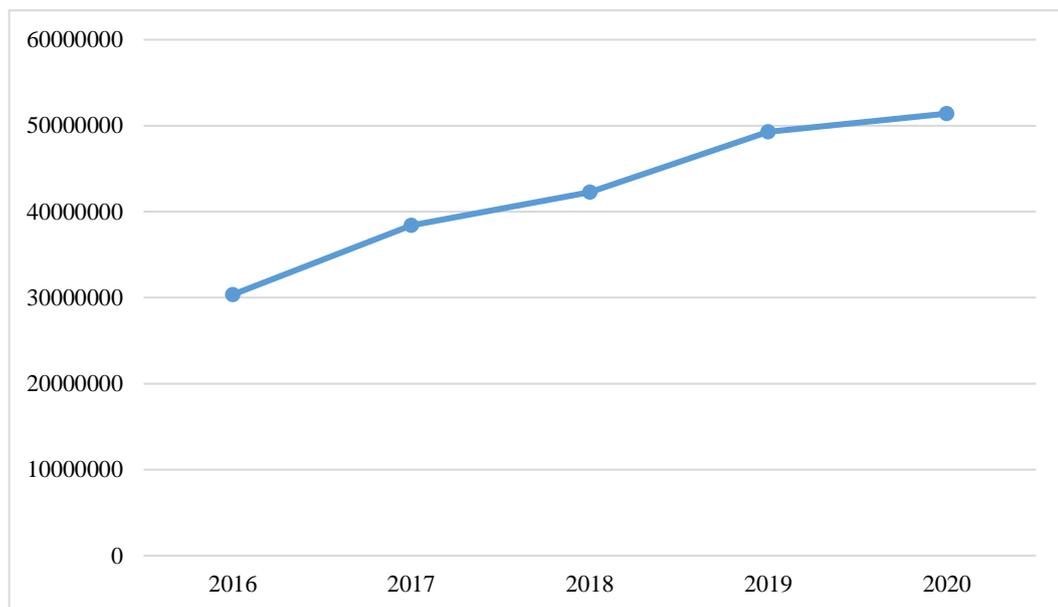
Investasi merupakan salah satu pendorong yang penting dalam pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu memberikan keuntungan. Penanaman modal akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. (Supancana, 2006: 10).

Dalam hal ini, potensi Indonesia sebagai negara penerima investasi sangat besar karena terlimpahnya sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dapat bersaing dan berkualitas. Maka dari itu, Pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan investasi, baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Namun sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, hal ini tidak menjamin tingkat investasi yang besar karena jumlah tabungan yang meningkat tidak cukup untuk investasi. Maka dari itu, negara tetap harus mengundang investasi asing (PMA) yang belum tentu menguntungkan negaranya (Prasetyo, 2009: 99).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang sedang menggencarkan pembangunan ekonomi di berbagai sektor yang mana sedang berupaya menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Barat.

Adapun secara terperinci dapat dilihat dalam realisasi PMDN Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 pada Gambar 1.1 dibawah ini:

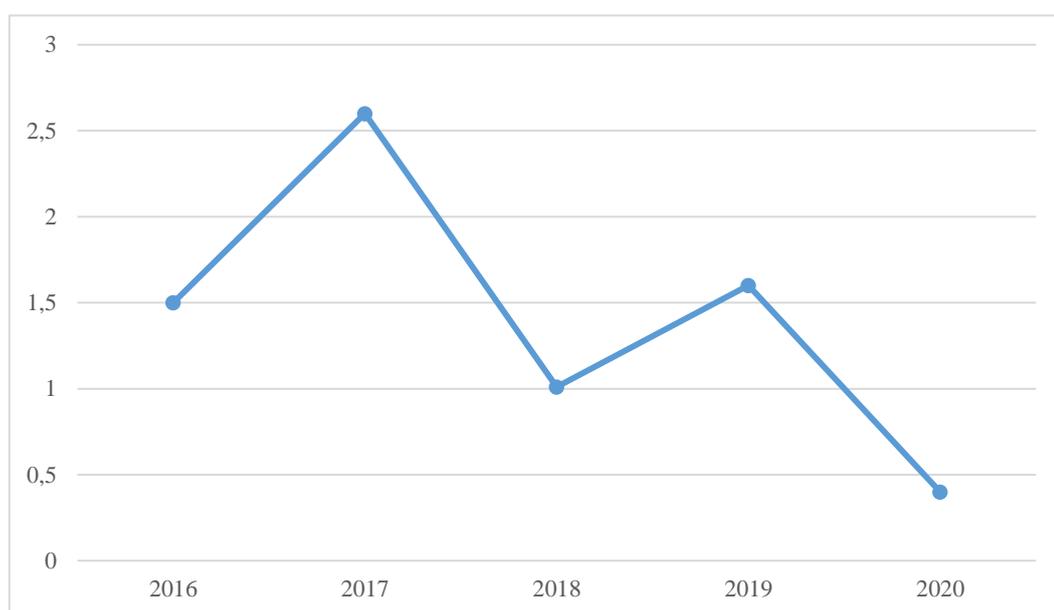


Gambar 1.1 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat selama tahun 2016-2020 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat terbilang positif dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata sebesar 42.342.754,5 juta rupiah. Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan investasi sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi didalamnya serta dikenal sebagai salah satu provinsi yang memiliki letak yang geografis dan demografis serta strategis dan

memiliki sumber daya manusia yang terampil serta sumber daya alam yang cukup melimpah disegala sektor.

Namun, realisasi PMDN di Provinsi Jawa Barat yang jumlahnya selalu meningkat dari tahun 2016-2020 tersebut ternyata apabila dilihat dari pertumbuhannya tidak menunjukkan hal yang baik seperti jumlah realisasi PMDN nya.



Gambar 1.2 Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Persen)

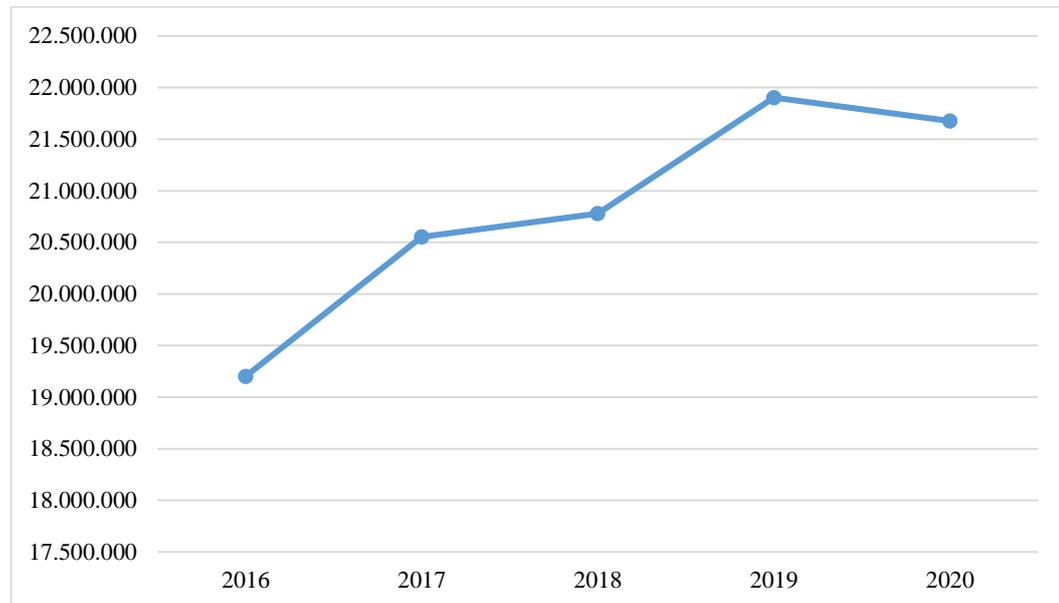
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah)

Gambar 1.2 diatas menunjukkan pertumbuhan PMDN di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 yang tidak stabil. Pada tahun 2017 tercatat pertumbuhan PMDN di Provinsi Jawa Barat sebesar 2,16%. Namun pada tahun 2018 pertumbuhannya menurun menjadi sebesar 1,01% yang kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 1,6%, walaupun angka tersebut tidak lebih tinggi dari angka pertumbuhan pada tahun 2017. Tetapi di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020 pertumbuhannya menurun drastis menjadi sebesar 0,6%.

Hal tersebut menandakan bahwasanya jumlah realisasi PMDN di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 yang selalu meningkat tidak serta-merta menunjukkan keadaan yang baik, karena apabila dilihat dari pertumbuhannya ternyata tidak begitu baik.

Nilai PMDN Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menduduki peringkat ke-3 di Pulau Jawa dari segi banyaknya nilai investasi. Namun jumlah tenaga kerja di Jawa Barat merupakan yang terbesar ke-1 di Indonesia dan dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Peningkatan jumlah tenaga kerja Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terakhir mengakibatkan acuan dalam kegairahan investasi karena adanya peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan kapasitas produksi tersebut yang nantinya akan meningkatkan pula investasi . Berikut merupakan jumlah tenaga kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 yang dijelaskan dalam Gambar 1.3 berikut ini:



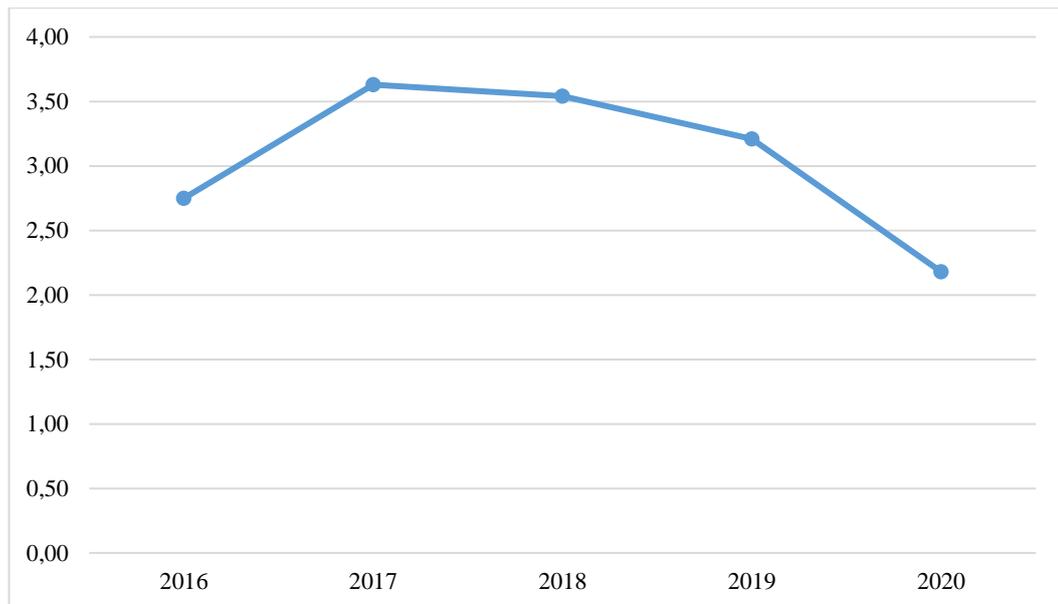
**Gambar 1.3 Jumlah Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Jiwa)**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.3 diatas dapat dilihat selama tahun 2016-2020 tenaga kerja dapat dikatakan positif. Namun pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja mengalami penurunan menjadi sebesar 21.674.854 jiwa. Hal ini dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19.

Jumlah investasi tidak terlepas dari adanya pengaruh inflasi (Messakh dan Amtiran, 2019: 4). Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus (Nopirin, 2012: 25). Sesuai dengan teori ekspansi permintaan agregat kasus klasik (Dornbusch, 2008) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara inflasi dengan investasi, artinya kenaikan inflasi akan menurunkan investasi dan penurunan inflasi akan menaikkan investasi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2000 di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan manfaat positif kepada pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

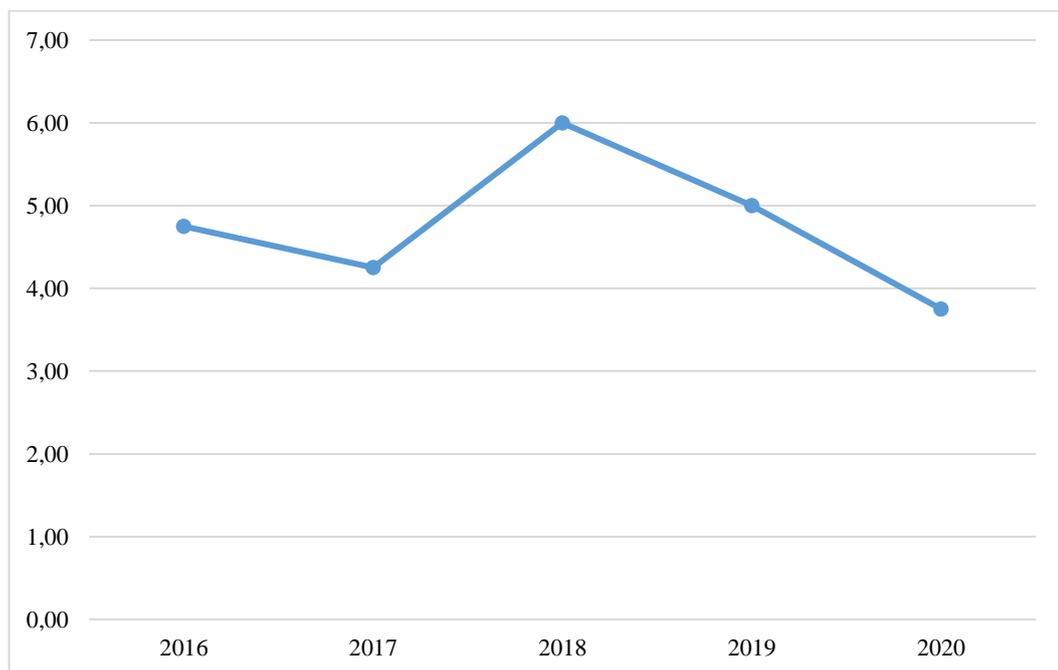


**Gambar 1.4 Inflasi Tahunan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Persen)**
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.4 perkembangan inflasi Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan yakni dari 2,75 persen menjadi 3,63 persen, namun pada tahun 2018 sampai tahun 2020 inflasi mengalami penurunan mencapai 2,18 persen.

Selain faktor-faktor diatas juga faktor lain yang sangat mempengaruhi kegiatan investasi yang berasal dari dalam negeri dan kegiatan investasi yaitu suku bunga (Tandelilin, 2001: 4). Suku bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang (*present value*) aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Suku bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang harus di tanggung perusahaan.

Disamping itu suku bunga yang tinggi juga akan menyebabkan return yang diisyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat. Rendahnya suku bunga akan meningkatkan investor karena kredit yang diberikan bank masih menguntungkan untuk melakukan investasi. Ketika suku bunga rendah, investasi akan meningkat (Lubis, 2008: 3).



Gambar 1.5 BI Rate Tahunan Tahun 2016-2020 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.5 dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga pada tahun 2017 mengalami penurunan yang semula 4,75 persen menjadi 4,25 persen. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,00 persen. Namun pada tahun 2019 dan 2020 tingkat suku bunga mengalami penurunan hingga mencapai 3,75 persen.

Dari uraian latar belakang tersebut, secara garis besar kondisi sektor penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu sektor dalam upaya pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Sehingga judul penelitian yang diambil oleh

penulis adalah “**Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Inflasi, dan Suku Bunga Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2020**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tenaga kerja, inflasi, dan suku bunga secara parsial terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2020?
2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja, inflasi, dan suku bunga secara bersama-sama terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

- 1 Mengetahui pengaruh tenaga kerja, inflasi, dan suku bunga secara parsial terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2020.
- 2 Mengetahui pengaruh tenaga kerja, inflasi, dan suku bunga secara bersama-sama terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2020.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti, sebagai sarana penambah pengetahuan mengenai tenaga kerja, inflasi, dan suku bunga serta pengaruhnya terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan penanaman modal dalam negeri khususnya di Provinsi Jawa Barat.
3. Bagi masyarakat, sebagai penambah pengetahuan, wawasan, dan informasi khususnya pelaku usaha dan investor mengenai gambaran tentang tenaga kerja, inflasi, dan suku bunga serta pengaruhnya terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat.
4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan rujukan dan informasi dalam melakukan penelitian sejenis.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Barat dengan data sekunder yang setiap variabelnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, serta beberapa sumber media *online* yang relevan dan terpercaya.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2021. Adapun jadwal penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2021												Tahun 2022								
	Oktober			November				Desember				Januari				Februari				Maret	
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Pengajuan judul	■																				
Penyusunan usulan penelitian		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Sidang usulan penelitian										■	■										
Revisi usulan penelitian												■									
Penyusunan skripsi													■	■	■	■	■	■	■		
Sidang skripsi																				■	
Revisi skripsi																					■